

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong

Iyonna Jermina Salakay^{*}, Roberthair Suripatty^{**} dan La Ode Rajamin^{**}

^{*} Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Victory Sorong

^{**} Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Victory Sorong

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 1 Juli 2026

Disetujui 31 Juli 2026

Keywords:

Standar
Pemerintahan,
Laporan Keuangan,
Akuntabilitas,
Transparansi,
BPKAD Kota Sorong.

ABSTRAK

Abstract : This study aims to analyze the effect of implementing Government Accounting Standards (Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) on the quality of financial statement accountability at the Regional Financial and Asset Management Agency (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) of Sorong City. The study employed a descriptive quantitative approach, with financial ratio analysis and simple regression analysis used as the data analysis techniques. The data were obtained from the financial statements of the Sorong City Government for the 2015–2018 period. The results indicate that the implementation of SAP has a positive effect on the quality of regional financial statement presentation. This is reflected in improvements in the transparency, accountability, effectiveness, and efficiency of regional financial management. The analysis of regional revenue growth shows that the average growth rate of Regional Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) was 16.88%, while the regional financial independence ratio remained relatively low, with an average of 3.46%. In addition, the effectiveness of regional tax management reached an average of 154.54%, indicating a relatively strong performance in revenue management. Through the consistent implementation of SAP, local government financial statements can be prepared in a manner that is relevant, reliable, comparable, and understandable, thereby supporting the realization of good governance principles within the Sorong City Government.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data berupa analisis rasio keuangan dan regresi sederhana. Data diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kota Sorong periode 2015–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP memberikan pengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari meningkatnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Analisis pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,88%, sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah dengan rata-rata 3,46%. Selain itu, efektivitas pengelolaan pajak daerah mencapai rata-rata 154,54% yang menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan cukup baik. Dengan diterapkannya SAP secara konsisten, laporan keuangan pemerintah daerah dapat disusun secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sehingga mendukung terwujudnya prinsip good governance di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Iyonna Jermina Salakay,
Dosen Program Studi Akuntansi,
Universitas Victory Sorong

Jl. Basuki Rahmat, Kilometer 11,5, Kel. Klawuyuk / Klasaman, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong,

E-Mail : iyonnasalakay16@gmail.com

PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam sektor pemerintahan, akuntansi memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Seiring berkembangnya tuntutan reformasi birokrasi dan good governance, pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah Indonesia menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. SAP bertujuan menciptakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, relevan, andal, serta dapat dibandingkan antarperiode.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong sebagai institusi pengelola keuangan daerah memiliki tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi yang belum optimal, dan ketergantungan terhadap dana pusat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pada BPKAD Kota Sorong.

Landasan Teori

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP menjadi pedoman wajib bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas publik.

Penerapan SAP memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah;
2. menciptakan transparansi pengelolaan keuangan;
3. meningkatkan akuntabilitas publik;
4. memudahkan proses audit dan evaluasi kinerja pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya ekonomi daerah. Komponen laporan keuangan meliputi :

1. neraca,
2. laporan realisasi anggaran,
3. laporan arus kas,
4. laporan perubahan ekuitas,
5. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik:

1. relevan,
2. andal,
3. dapat dibandingkan,
4. dapat dipahami.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BPKAD Kota Sorong dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data penelitian terdiri dari :

1. data primer melalui observasi dan wawancara;
2. data sekunder berupa laporan keuangan Pemerintah Kota Sorong tahun 2015–2018.

Variabel penelitian meliputi:

1. Variabel bebas (X): penerapan SAP;
2. Variabel terikat (Y): kualitas laporan keuangan.

Teknik analisis data menggunakan:

1. analisis rasio keuangan;
2. analisis pertumbuhan pendapatan;
3. analisis efektivitas dan efisiensi;
4. analisis kemandirian keuangan daerah.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kota Sorong

Kota Sorong merupakan salah satu kota strategis di wilayah timur Indonesia yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pintu gerbang menuju wilayah Papua Barat. Kota ini memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi regional sehingga membutuhkan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kota Sorong selama tahun 2015–2018 mengalami fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan PAD mencapai 16,88%, yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan.

Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan pertumbuhan sebesar -25,34%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan optimalisasi sumber-sumber PAD.

Analisis Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi Kota Sorong rata-rata sebesar 3,34%. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata sebesar 3,46%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sorong masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah tergolong sangat baik dengan rata-rata 154,54%. Hal ini menandakan realisasi penerimaan pajak mampu melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, rasio efisiensi pajak daerah rata-rata sebesar 267,14%. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan biaya pemungutan pajak masih perlu diperbaiki agar lebih efisien.

Analisis Belanja Daerah

Pertumbuhan belanja daerah Kota Sorong selama tahun 2015–2018 menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 6,98%. Sebagian besar anggaran dialokasikan pada belanja operasional sebesar 66,49%, sedangkan belanja modal sebesar 33,51%.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih lebih fokus pada pembiayaan operasional dibandingkan pembangunan aset dan infrastruktur daerah.

Pembahasan

Penerapan SAP pada BPKAD Kota Sorong terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan adanya SAP, penyusunan laporan keuangan menjadi lebih sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan SAP juga membantu pemerintah daerah dalam :

1. meningkatkan kualitas informasi keuangan;
2. mempermudah pengawasan dan audit;
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti:

1. rendahnya kemandirian keuangan daerah;
2. ketergantungan pada dana transfer pusat;
3. perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pada BPKAD Kota Sorong.
2. Pertumbuhan PAD Kota Sorong menunjukkan tren positif meskipun mengalami penurunan pada tahun tertentu.
3. Tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah karena tingginya ketergantungan terhadap dana pusat.
4. Efektivitas pengelolaan pajak daerah tergolong baik, namun efisiensi pengelolaan masih perlu ditingkatkan.
5. Sebagian besar anggaran daerah masih dialokasikan untuk belanja operasional.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi PAD melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara maksimal.
2. Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar belanja daerah lebih produktif.
4. Pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan SAP harus dilakukan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukri. 2010. *Telaah Reformasi Akuntansi Pemerintahan (Menuju Basis Akrual) dalam Mewujudkan Good Governance*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 Tahun 2010*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi*.
- [Jasa Konsultan Akuntansi – Laporan Keuangan Menurut PSAK](#)
- [Jurnal.id – Jenis-Jenis Laporan Keuangan dalam Akuntansi](#)